

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang umumnya memiliki masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, tingkat inflasi yang tinggi dan juga pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat umum dihadapi, hampir disetiap negara berkembang mempunyai masalah yang sama yaitu kemiskinan, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan yang terjadi disuatu negara menjadi tolak ukur untuk melihat baik buruknya perekonomian suatu negara (Ningsih, 2018).

Kemiskinan struktural sering dilihat sebagai suatu gejala yang tetap di tengah-tengah masyarakat. Misalnya melihat kemiskinan struktural sebagai suatu fenomena yang *built-in* di mana ada suatu golongan sosial yang menderita kekurangan-kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa usaha yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan itu. Dengan demikian kemiskinan struktural mencerminkan gejala ketidakmampuan yang melekat di dalam struktur sosial masyarakat (Pinem, 2019).

Masalah peningkatan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara akibat pengaruh kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, kurangnya penyerapan tenaga kerja, dan minimnya anggaran pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Terdapat tiga kabupaten di Maluku Utara yang jumlah penduduk miskinnya di atas 10 ribu jiwa, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat. Keberadaan perusahaan tambang di Kabupaten Halmahera Timur tidak mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu pengentasan masalah kemiskinan harus

menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi ketimpangan pendapatan dapat menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk wilayah/regional dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Maluku Utara memiliki pertumbuhan yang tinggi di kawasan regional. Faktor yang dominan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dari sisi permintaan adalah ekspor luar negeri, investasi (pembentukan modal tetap bruto), konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Meskipun ada perlambatan tertahannya harga komoditi utama Maluku Utara seperti kopra, pala, dan cengkeh turut memberikan andil terhadap turunnya konsumsi rumah tangga. Namun pertumbuhan ekonomi masih didominasi dengan meningkatnya ekspor luar negeri dari sektor pertambangan (Susanto & Indah, 2020).

Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah permintaan agregat. Permintaan agregat sendiri dipengaruhi oleh harga sesuai dengan hukum permintaan dimana jika harga naik maka permintaan akan menurun. Kenaikan suatu barang akan meningkatkan tingkat Inflasi, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat dan menambah tingkat kemiskinan. Daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan akan menurun dikarenakan kenaikan harga barang secara umum dengan asumsi tingkat pendapatannya tetap. Tingkat pendapatan secara riil akan menurun manakala terjadi inflasi dan akibatnya adalah penurunan

tingkat konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus menurun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan (Saputra, 2013).

Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate. Selama dua tahun terakhir inflasi kota ternate lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Kenaikan inflasi di Kota Ternate dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan peningkatan permintaan. Sebagai contoh keterbatasan *supply* pada sub kelompok daging dan bumbu mengakibatkan meningkatnya permintaan. Permintaan yang tinggi pada sub kelompok tersebut harus dipenuhi dari luar Maluku Utara yang membutuhkan biaya angkut yang cukup tinggi. Hal tersebut terkonfirmasi dari tingginya inflasi pada kelompok transport dan pengiriman.

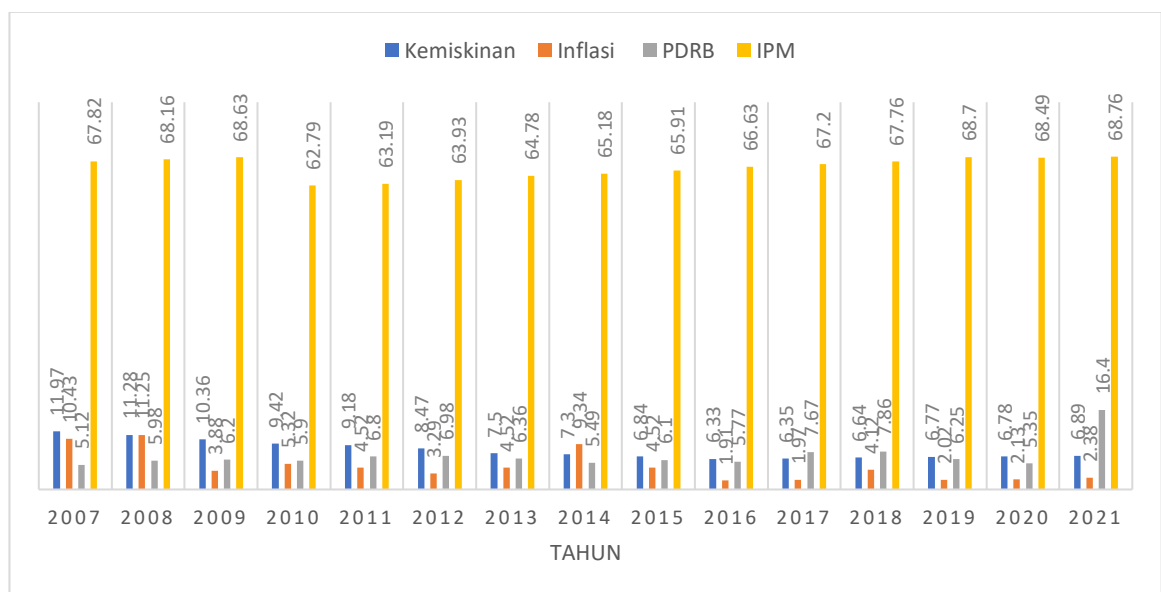
Terlepas dari Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel penting bagi suatu daerah dalam menentaskan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia dikatakan sebagai pengukur kesejahteraan dan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB perkapitanya (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara harus menjadi masalah yang diprioritaskan oleh Pemerintah karena kemiskinan menyangkut kehidupan manusia (dalam memperoleh kehidupan yang lebih layak). Banyak strategi atau

pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun semua belum mampu untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara disebabkan pembangunan yang dilakukan tidak merata hanya difokuskan di daerah perkotaan saja sedangkan kondisi pembangunan di daerah pelosok masih sangat memprihatinkan.

Provinsi Maluku Utara memiliki beragam potensi ekonomi, dari sumber daya alam berbasis pertanian, kelautan dan pariwisata. Potensi ini diharapkan dapat diberdayakan secara maksimal sehingga meningkatkan perekonomian wilayah. Pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran yang ingin dicapai pemerintah Provinsi Maluku Utara agar bisa meningkatkan pendapatan perkapita dan menurunkan kemiskinan (Mashud, 2018)

Berikut ini akan disajikan grafik jumlah kemiskinan, inflasi, PDRB, dan IPM di Provinsi Maluku Utara tahun 2007-2021.



Sumber BPS Provinsi Maluku Utara

Gambar 1.1 Grafik Data Jumlah Penduduk Miskin, Inflasi, PDRB dan IPM Di Provinsi Maluku Utara 2007-2021

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan selama periode 2007-2021 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 11,97 persen hal ini disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Sementara Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 2007-2021 dan PDRB atas dasar harga konstan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 16,40 persen karena adanya kenaikan pendapatan masyarakat yang diperoleh melalui kekayaan sumber daya alam, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja serta kemajuan teknologi sehingga dapat mengakibatkan peningkatan kesejahteraan penduduk yang berarti bahwa jumlah kemiskinan akan menurun. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan dapat dilihat kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,33 persen. Kemudian kemiskinan Kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 6,35 persen hingga pada tahun 2020 sebesar 6,78 persen disebabkan oleh menurunnya nilai tukar petani khususnya pada subsektor tanaman pangan dan perikanan. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan disetiap tahunnya dan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 68,76 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam jangka pendek berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara?

2. Apakah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara?
3. Apakah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam jangka pendek terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara
2. Untuk mengetahui inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam jangka panjang terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pemerintah, dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan dalam meningkatkan faktor yang memicu penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.
2. Perguruan tinggi, sebagai salah satu sarana literasi di perguruan tinggi guna pembelajaran ataupun referensi penelitian.
3. Pembaca, sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis dan lebih detail.

4. Peneliti, mengetahui pengaruh dan menganalisis antara inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tahun 2007-2021.